

WELFARE STATE DI AUSTRALIA PASCA PERANG DUNIA II (1945-1950)

WELFARE STATE IN AUSTRALIA POST WORLD WAR II (1945-1950)

Oleh: Sunu Pribadi Waspada dan Saefur Rochmat, S.Pd., M.Ir., Ph.D.
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
reasond@gmail.com

Abstrak

Welfare state merupakan sebuah kondisi dimana negara dapat memenuhi kesejahteraan warga negaranya. Implementasi *welfare state* di Australia pasca Perang Dunia II merupakan topik yang belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) *welfare state* di Australia antara tahun 1945-1950, (2) implementasi *welfare state* dalam kebijakan Australia pasca PD II, (3) pengaruh implementasi *welfare state* dalam bidang sosial dan ekonomi Australia pasca PD II (1945-1950). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto yang terdiri dari empat langkah yang terdiri dari: (1) heuristik atau proses pengumpulan data dari berbagai sumber, (2) kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern, (3) interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat, dan (4) historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemerintah Australia telah memiliki pondasi *welfare state* yang kokoh pada periode tahun 1945-1950. (2) pemerintah Australia mengimplementasikan *welfare state* dalam bentuk kebijakan di bidang sosial-ekonomi terkait kesejahteraan umum. (3) pengaruh *welfare state* di bidang sosial antara lain para veteran mendapatkan layanan rehabilitasi dari pemerintah dan para imigran dari berbagai belahan dunia dapat masuk dengan bebas ke Australia. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Australia berhasil mengatasi masalah-masalah yang timbul pasca PD II dan berujung pada perkembangan ekonomi Australia.

Kata kunci: *Welfare State, Kebijakan, Australia, 1945-1950.*

Abstract

Welfare state is a condition when a state can provide the welfare needs of its citizens. The implementation of welfare state in Australia after WWII is a topic that not commonly written. This research aims to know about: (1) welfare state in Australia between 1945-1950, (2) the implementation of welfare state on Australia's policies after WWII, (3) the impact of welfare state implementation in social and economical sector after WWII (1945-1950). This research using Nugroho Notosusanto's research method that consists of four steps including: (1) heuristic or retrieving data from various sources, (2) source criticism that consists of external and internal criticism, (3) interpretation to synthesize the retrieved facts, and (4) historiography or historical writing. The research shows that: (1) Australian government had a strong welfare state basis in 1945-1950 period. (2) the Australian government implementing welfare state in a social-economy policies related to citizen welfare. (3) the impact of welfare state in social sector shown as the Australian Government provide the rehabilitation programme for veterans and widely opening the state for many immigrants from across the world. In economical sector, the Australian government succeeded in outcoming the post WWII economy issues and resulting in Australia's rise in their economy.

Keywords: *Welfare State, Policies, Australia, 1945-1950.*

PENDAHULUAN

Terdapat berbagai bentuk kesempatan sekaligus ketidakstabilan di kalangan rakyat Australia pada tahun 1940-an dan awal 1950-an.¹ Krisis pangan dan inflasi di akhir 1940-an, dan menipisnya cadangan material konstruksi yang muncul pada pertengahan tahun 1950-an menjadi masalah yang menyita perhatian pemerintah Australia. Pada periode inilah Australia mulai melakukan rencana-rencana rekonstruksi pasca perang yang telah disusun sejak tahun 1942.² Sebagai salah satu negara di dunia yang menjalankan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*, Australia memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan dan mengusahakan penghidupan yang layak bagi warganya. Dengan kata lain, Australia memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terkait dengan dinamika yang timbul pada masa setelah perang. Selain masalah kemiskinan, pemerintah saat itu juga menghadapi masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Australia juga perlu mengatur langkah untuk mengubah struktur ekonomi saat itu, dari ekonomi perang menuju ekonomi damai.

Selain permasalahan di bidang ekonomi, pemerintah Australia juga perlu memperhatikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor sosial. Terdapat perubahan (atau lebih tepatnya *shock*) yang timbul ketika para eks-pejuang kembali ke kehidupan sipil setelah mendapatkan pengalaman di medan perang. Pada masa ini

kemudian dilakukan berbagai kebijakan antara lain pemberian bantuan kepada para veteran perang agar mereka dapat beradaptasi kembali di kehidupan normal (*civil life*). Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan “*populate or perish*” yang kemudian membuka jalur imigrasi bagi orang-orang dari berbagai negara (terutama negara-negara Eropa) untuk dapat tinggal menetap di Australia.³ Dua fenomena ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Australia antara tahun 1945 hingga 1960-an berupa timbulnya multikulturalisme di kalangan masyarakat Australia.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap literatur yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran dalam suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis memperoleh data-data atau informasi yang lengkap dan valid.

Untuk dapat memahami dan menganalisis masalah ini penulis menggunakan buku karya Philip Mendes yang berjudul *Australia's Welfare Wars: the Players, the Politics and the Ideologies*. Penulis juga menggunakan buku karangan Paul Hasluck yang berjudul *The Government and the People 1942-1945*. Buku dari Paul Hasluck merupakan salah satu buku sumber inti dari sejarah PD II yang ada di Australia. Kedua buku ini membahas dengan rinci perkembangan kondisi serta kebijakan Australia pada masa PD II.

¹Curthoys, Ann & John Merritt. *Australia's First Cold War vol 1: Society, Communism and Culture*. (Hong Kong: George Allen & Unwin, 1984). hlm. 3.

² Clarke, *op.cit.*, hlm. 263.

³ Dare, Tim, *Australia: A Nation of Immigrants*. (Australia: Griffin Press, 1984), hlm. 144.

Untuk membahas kondisi Australia pasca PD II dari segi sosial, penulis menggunakan buku dari Kementerian Rekonstruksi pasca Perang (*Ministry of Post-War Reconstruction*) yang berjudul *Return to Civil Life* yang berisi panduan bagi para veteran perang agar dapat kembali ke kehidupan sipil dan buku karangan Stuart Macintyre yang berjudul *A Concise History of Australia* yang membahas mengenai perkembangan kehidupan sosial masyarakat Australia pasca PD II hingga masa kontemporer.

Guna mengkaji masalah yang muncul setelah perang berakhir, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah Australia serta isu dan masalah yang timbul pada masa pasca PD II di bidang ekonomi, penulis menggunakan literatur berupa buku karangan Ian W. McLean yang berjudul *Why Australia Prospered: The Shifting Sources of Economic Growth*. Buku ini membahas ekonomi Australia secara komprehensif dan mendetail, dari masa federasi Australia hingga masa kontemporer dibawah tahun 2000 dan jurnal karangan Douglas Copland yang berjudul *The Australian Post-War Economy: A Study in Economic Administration*.

Buku karya A. Zuhdi Mukhdlor berjudul *K.H. Ali Ma'shum: Perjuangan dan Pemikiran-pemikirannya* yang diterbitkan oleh Multi Karya Grafika tahun 1989. Secara umum, buku ini berisi menjelaskan kiprah Kiai Ali Ma'shum sejak masa remaja hingga peranannya di NU.

Metode Penelitian

Sejarah dapat didefinisikan sebagai rekonstruksi masa lalu.⁴ Dalam suatu penelitian sejarah, untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dibutuhkan suatu metode dengan berbagai macam pendekatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap peristiwa sejarah dengan logis dan kritis. Sehingga hasil yang diperoleh saat merekonstruksi sejarah dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan terdiri dari: (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi.

Heuristik merupakan proses pengumpulan jejak-jejak masa lalu yang biasa juga disebut data-data sejarah. Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua menurut jenisnya yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Louis Gottschalk⁵, sumber primer dapat berupa kesaksian dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang melihat suatu peristiwa sejarah dengan mata kepala sendiri atau dengan media lain seperti menggunakan alat mekanik. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber primer antara lain Australian Federal Register of Legislation. *Re-establishment and Employment Act No. 11 of 1945* yang disahkan tanggal 28 Juni 1945, *Australia's Soldier Repatriation Act No. 37* yang disahkan tanggal 28 September 1917, dan *National Welfare Fund Act No. 41 of 1945* (Amandemen dari *National Welfare Fund Act 1943*) yang disahkan tanggal 11 Oktober 1945.

⁴ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995). Hlm.17.

⁵ Gottschalk, Louis, *Understanding History*. Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 52.

Sumber sekunder yang digunakan peneliti antara lain: Watts, Rob. (1980) "The origins of the Australian welfare state." *Historical Studies* Volume 19 No.75, Copland, Douglas. (1954) "The Australian Post-War Economy: A Study in Economic Administration." *The Canadian Journal of Economics and Political Science*. Volume 20 No. 4, dan Macintyre, Stuart. (2009) *A Concise History of Australia*. Melbourne: Cambridge University Press.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.⁶ Kritik ekstern digunakan untuk melihat keaslian suatu sumber dari bentuk fisik, usia, dan aksesibilitas dokumen/sumber sejarah. Sedangkan untuk kritik intern lebih menekankan pada isi dokumen atau sumber sejarah. Pada tahapan kritik ekstern, peneliti melihat keaslian sumber dari lembaga yang mengeluarkan UU, dalam hal ini pemerintah Australia. Selain itu, peneliti melakukan uji kredibilitas terhadap isi dengan membandingkan sumber sejarah dengan sumber-sumber yang lain untuk mengetahui dan menguji seberapa jauh isi informasi dari sumber sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya.

Tahap penelitian yang berikutnya adalah interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Penafsiran ini diperoleh berdasarkan kekuatan analisis yang diperkuat melalui kajian pustaka. Dalam kegiatan ini, penulis berusaha menganalisis sumber-sumber yang ada, kemudian menyunting sumber-sumber tersebut dalam bentuk penulisan skripsi.

Tahapannya dibagi menjadi dua yaitu *analisis* dan *sintesis*. Analisis berfokus pada pembahasan materi secara mendalam dan runtut, sedangkan sintesis adalah proses pengolahan hasil analisis yang telah dilakukan.

Historiografi menjadi tahap terakhir dari penelitian. Tahap ini merupakan suatu kegiatan merangkai fakta-fakta menjadi suatu sejarah setelah melakukan beberapa hal yaitu pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran sumber yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah dalam wujud tulisan. Dalam tahap ini penulis dituntut untuk dapat berimajinasi dalam koridor historis sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh yang sistematis serta komunikatif.

PEMBAHASAN

***Welfare State* di Australia Tahun 1945-1950**

Welfare state (secara harafiah berarti negara kesejahteraan) merupakan sebuah kondisi dimana negara sebagai bentuk kekuasaan tertinggi menjamin kesejahteraan rakyatnya, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Menurut pengertian sempit, *welfare state* terdiri dari dua jenis pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu pemberian bantuan secara langsung dalam lingkup rumah tangga/perorangan. Sedangkan menurut pengertian yang lebih luas, *welfare state* juga mencakup pengendalian sektor-sektor krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti kenadli atas harga sewa, kebijakan perumahan,

⁶ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 11.

peraturan lingkungan kerja, peraturan keamanan kerja, dan kebijakan mengenai lingkungan hidup.⁷

Konsep *welfare state* pertama kali diperkenalkan di Australia pada awal abad 20. Munculnya depresi ekonomi, berdirinya *trade unions* (serikat dagang) dan Partai Buruh pada tahun 1890-an mendorong timbulnya gerakan reformasi dalam bidang kesejahteraan yang diwujudkan dalam konsep *welfare state* ini. Konsep mengenai *welfare state* di Australia berkembang dengan dasar pengertian secara umum, bahwa kesejahteraan selalu berakar pada rasa simpati dan belas kasih terhadap mereka yang lemah, serta tindakan-tindakan praktis terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi.⁸

Terdapat dua elemen kunci dari konsep *welfare state* terkait dengan perekonomian: Manfaat terkait dengan pekerjaan dan Kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Konsep ini muncul hampir bersamaan dengan terbentuknya Australia sebagai federasi pada awal abad ke-20 dan mulai berubah bentuk di awal tahun 1980an. Serangkaian pengaturan kelembagaan terbentuk dalam kurun waktu tersebut. Pengaturan-pengaturan tersebut berpusat pada sektor tenaga kerja yang diatur oleh negara sebagai sistem perlindungan sosial dengan model *welfare state* yang hampir sama dengan Inggris.⁹ tahun 1949, pemerintah Australia telah berhasil memenuhi

tanggung jawab atas semua tunjangan utama perlindungan sosial dan perawatan kesehatan dan memiliki pondasi *welfare state* yang kuat.¹⁰

Kebijakan dan Implementasi *Welfare State* di Australia Pasca PD II (1945-1950)

Keterlibatan Australia dalam panggung PD II berakhir ketika Australia menyelesaikan pertempuran di Papua dan Tarakan pada tahun 1943. Dan dengan berakhirnya PD II secara umum, perbaikan kondisi pasca PD II menjadi tujuan umum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perang. Perencanaan Australia untuk menghadapi masa setelah perang juga telah dimulai sejak tahun 1940 pada masa pemerintahan Robert Menzies. Ketika *Department of Labour and National Service* dibentuk pada tahun 1940, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membentuk Divisi Rekonstruksi (*Reconstruction Division*) dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang akan muncul setelah perang berakhir.

Rencana pemerintah dalam menjalankan rekonstruksi pasca perang membutuhkan demobilisasi¹¹ atas pasukan bersenjata. Demobilisasi di Australia merupakan program yang bertujuan untuk mengembalikan para veteran perang ke kehidupan masyarakat normal.¹² Layanan yang disediakan oleh pemerintah Australia dalam program ini meliputi pelatihan

⁷ Lindbeck, Assar, "The welfare state: background, achievements, problems," *IFN Working Paper No. 662, 2006*, hlm. 2.

⁸ Watts, Rob, "the origins of the Australian welfare state," *Historical Studies* volume 19 no.75, 1980, hlm. 175.

⁹ Gray, Mel, "The changing face of social welfare and social work in Australia," *ERIS web*

Journal, 2011, New South Wales: University of Newcastle, hlm. 5.

¹⁰ Kewley, *loc.cit.*

¹¹ Demobilisasi merupakan proses pemberian status bebas tugas dari militer kepada tentara yang dikerahkan pada masa perang. Rangkaian proses ini dilakukan setelah perang selesai, atau ketika perlu penurunan pada jumlah kekuatan militer.

¹² Hasluck, *op.cit.*, hlm. 602.

keterampilan, pengadaan tempat tinggal serta lapangan kerja. Kabinet Australia menyetujui rencana demobilisasi yang diajukan *Department of Post-War Reconstruction* pada tanggal 12 Juni 1944. Kemudian program demobilisasi di Australia mulai dirancang pada Maret 1945 dan diimplementasikan pada tanggal 16 Agustus di tahun yang sama, setelah Jepang menyatakan menyerah. Program ini dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Pemulangan Tentara Australia (*Australian Soldier's Repatriation Act*) yang disahkan pada tahun 1917.¹³

Dalam konsep *welfare state*, masalah setelah demobilisasi terkait dengan persiapan menuju kehidupan sipil turut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada bulan Juni 1945 Pemerintah Australia mengesahkan Undang-Undang Pembangunan dan Ketenagakerjaan No.11 tahun 1945 (*Re-establishment and Employment Act 1945*)¹⁴. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi bagi para anggota militer, mengembalikan mereka ke kehidupan sipil, memfasilitasi mereka dengan lapangan kerja yang tepat, serta beberapa fungsi lainnya

berbicara mengenai kehidupan para veteran pasca PD II, kondisi mental para veteran juga tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan mereka. Sebagian dari para veteran yang kembali ke Australia mengidap sebuah sindrom yang

disebut PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) atau gangguan stres pascatrauma. PTSD merupakan gejala psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami suatu kejadian yang sifatnya traumatis. Seperti kekerasan seksual, peperangan, kecelakaan, dan hal-hal lain yang bersifat mengancam keberlangsungan hidup seseorang.¹⁵

Oleh karena itu pada tahun 1946 Departemen Pelayanan Sosial (*Department of Social Services*) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pendampingan selama masa rehabilitasi para veteran tersebut sekaligus menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih luas. Departemen ini membuat program pelatihan kejuruan bagi para pensiunan tentara yang telah mengikuti program demobilisasi. Departemen ini juga mengelola skema rehabilitasi untuk para veteran yang mengalami disabilitas. Tercatat hingga tahun 1950 telah ada 94.000 orang yang selesai menjalani kuliah di universitas maupun mengikuti pelatihan keterampilan yang disediakan oleh *Department of Postwar Reconstruction*, dan 39.000 orang masih menjalani pelatihan.¹⁶

Pasca demobilisasi tentara Australia, pemerintah membentuk suatu kebijakan terkait dengan masalah kependudukan. Salah satu faktor kunci dari pembangunan pasca perang adalah migrasi.¹⁷ Pada tahun 1945 pemerintah mengumumkan pemberlakuan program imigrasi

¹³ Lihat lampiran 7 di halaman 104.

¹⁴ Selanjutnya penulis akan menyebutkan sebagai *Re-establishment and Employment Act*.

¹⁵ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders* (Edisi kelima), (Washington: American Psychiatric Publishing, 2013), hlm. 271.

¹⁶ Long, Gavin, *The Six Years War. A Concise History of Australia in the 1939-1945 War* (Canberra: Australian War Memorial, 1973), hlm. 476.

¹⁷ Hasluck, *op.cit.* hlm. 521.

yang disebut juga dengan ‘*populate or perish*’ (‘berpopulasi atau musnah’).¹⁸ Untuk pertama kalinya, pemerintah menerapkan program imigrasi skala besar untuk jangka waktu 20 tahun.

Gelombang migrasi pasca perang yang pertama terutama berasal dari orang-orang yang Eropa Timur (*displaced persons*). Orang-orang ini meninggalkan negara mereka akibat perang, pergeseran perbatasan Negara maupun karena menghindari persekusi oleh Uni Soviet. Antara tahun 1947 hingga 1953 Pemerintah Australia memberikan bantuan kepada lebih dari 170.000 *Displaced Persons* untuk pindah ke Australia. Pemerintah Australia membayar sebagian besar biaya untuk perjalanan menuju Australia dan mendirikan kamp-kamp penerimaan dan pelatihan imigran di berbagai tempat di Australia.

Tujuan dari kamp penerimaan dan pelatihan imigran adalah untuk menyediakan pelayanan dan pengecekan kesehatan bagi imigran secara umum, menyediakan bantuan dalam layanan sosial, wawancara untuk menentukan potensi kerja, pelatihan bahasa Inggris dan kebiasaan hidup di Australia secara umum. Sehingga selain digunakan sebagai tempat tinggal sementara, kamp penerimaan imigran juga berfungsi sebagai fasilitas bagi para imigran untuk mempelajari bahasa Inggris sementara mereka mencari pekerjaan yang bisa dilakukan.¹⁹

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah mengusulkan satu kebijakan berupa optimalisasi tenaga kerja (*Full Employment*)²⁰, dan kebijakan ini menjadi tujuan utama dari kebijakan rekonstruksi pasca perang milik Pemerintah.²¹ Pada tahun 1947 perwakilan dari departemen Keuangan dan *Department of Post-War Reconstruction*, bersama dengan *Department of Labour and National Services* dan Commonwealth Bank, bergabung dalam *Investment and Employment Committee* (Komite Investasi dan Ketenagakerjaan). Komisi ini diketuai oleh Chifley dan Dedman dengan tugas utamanya adalah untuk memastikan bahwa rencana perusahaan publik maupun swasta dapat mempromosikan kebijakan *full employment*.

Pertengahan tahun 1950, Australia menghadapi masa sulit dengan bertambahnya tingkat inflasi yang muncul karena pecahnya Perang Korea yang berakibat pada timbulnya dinamika dalam perdagangan internasional.²² Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan revaluasi terhadap mata uang Australia. Tanggal 18 September 1949, pemerintah Australia melakukan devaluasi terhadap mata uang sterling, menyusul Perancis yang juga mendevaluasi mata uang Franc pada bulan April di tahun yang sama. Kebijakan ini memiliki kaitan yang erat dengan kondisi perdagangan internasional yang saat itu mengalami dampak akibat krisis dolar.

¹⁸ Lihat lampiran 5 di halaman 103.

¹⁹ Arsip Nasional Australia, “Migrant accomodations”, www.naa.gov.au, diakses pada 9 Desember 2017.

²⁰ *Full Employment* merupakan sebuah istilah dalam makroekonomi dimana seluruh faktor produksi telah digunakan secara efisien dan keadaan perekonomian menuju kesejahteraan,

yang ditandai dengan tingkat pengangguran dibawah 4% dari total populasi sebuah Negara.

²¹ Macintyre, Stuart, *op.cit.*, hlm. 204.

²² Stevens, Glenn, “Inflation and Disinflation in Australia: 1950-91,” Reserve Bank of Australia, <http://www.rba.gov.au/publications/confes/1992/stevens.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2017.

Menjelang dekade 1950-an, kondisi ekonomi Australia memperlihatkan adanya peningkatan setelah pemerintah memberlakukan pengawasan atas beberapa sektor di bidang ekonomi makro serta menaikkan pajak untuk beberapa sektor.

Pengaruh *Welfare State* dalam Bidang Sosial dan Ekonomi di Australia Pasca PD II (1945-1950)

Tahun 1945 hingga tahun 1975 merupakan ‘zaman keemasan’ bagi perkembangan kehidupan masyarakat Australia. Populasi di kota-kota besar Australia mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk pada fase ini, selain disebabkan oleh kondisi Australia yang mulai kondusif pasca PD II, juga disebabkan oleh kebijakan *populate or perish* yang telah berjalan. Tanpa kebijakan ini, kemungkinan besar Australia hanya akan memiliki 10 juta populasi alih-alih 15 juta populasi, sekitar 30 persen lebih rendah.²³

memicu tumbuhnya multikulturalisme di kalangan masyarakat Australia. Keluarga-keluarga baru terbentuk antara penduduk Australia dengan para imigran. Australia telah berubah

menjadi negara dengan fungsi sebagai *melting pot*²⁴ bagi para penduduknya, menciptakan apa yang disebut dengan ‘*the New Australians*’ seperti yang telah dicanangkan oleh Arthur Calwell. Asimilasi para imigran dari berbagai negara menjadi satu, dengan identitas mereka yang baru sebagai warga Australia.

Di bidang ekonomi, beberapa faktor yang mendorong tingkat kesejahteraan pada ekonomi Australia pasca perang adalah kondisi sistem ekonomi internasional yang stabil dan berfungsi dengan baik. Tahun 1944 sistem moneter internasional yang baru telah terbentuk dengan adanya perundingan *Bretton Woods* yang dibentuk dengan tujuan memajukan stabilitas ekonomi negara-negara di dunia pada masa-masa setelah perang terutama dalam hal kerjasama di bidang moneter, stabilitas finansial, dan pertumbuhan ekonomi secara global.²⁵ Selain itu juga terdapat faktor yang mendukung berkembangnya keterbukaan dan stabilitas ekonomi domestik Australia, yaitu ketika terjadi liberalisasi progresif terhadap perdagangan internasional dibawah perlindungan *General Agreement on Tariffs and Trade*.²⁶ Dua faktor ini berperan penting dalam perkembangan

²³ Dare, Tim, *Australia: A Nation Of Immigrants* (New South Wales: Child & Associates), hlm. 174.

²⁴ *Melting pot* merupakan sebuah istilah dalam sosiologi yang menggambarkan suatu kondisi sosial dimana masyarakat yang heterogen bergabung menjadi masyarakat yang homogen. Individu-individu yang berbeda, baik secara ras, etnis, maupun budaya perlahan-lahan menyatu dan membentuk budaya yang baru. Hasil akhir dari *melting pot* adalah multikulturalisme.

²⁵ Henry, Ken, “Australia and the international financial architecture — 60 years on”, *Economic Roundup Spring, 2003*, Treasury of Australian Government,

<https://treasury.gov.au/publication/economic-roundup-spring-2003/australia-and-the-international-financial-architecture-60-years-on/>. Diakses pada 19 Januari 2018.

²⁶ *General Agreement on tariffs and Trades* (GATT) merupakan perjanjian resmi antara 23 negara dengan tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan laju perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan seperti bea cukai, kuota, dan sebagainya. Perjanjian ini ditandatangani di Jenewa pada 30 Oktober 1947 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1948, hingga diperbarui kembali pada 14 April 1994 di Marrakesh dengan mengikutsertakan 123 negara

ekonomi Australia karena dengan demikian Australia dapat terlibat dengan leluasa dalam perdagangan internasional.

Gencarnya pembangunan yang dilakukan pada tahun 1947 berdampak pada penyerapan tenaga kerja meningkat dengan sangat pesat. *Full employment* menyerap tenaga kerja dari para imigran telah bertempat tinggal di Australia. Industri berat seperti pabrik besi, kereta api, dan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Australia pada saat itu dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain.²⁷

Menjelang akhir dekade 1940, pembangunan infrastruktur menunjukkan perubahan yang cukup baik. Pusat kota mengalami renovasi untuk meningkatkan pelayanan administratif dan aktivitas komersial. Tingkat kepemilikan rumah meningkat dari 53 persen pada tahun 1947 menjadi 70 persen pada 1961. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa pengadaan tempat tinggal bagi para veteran yang membutuhkan tempat tinggal baru. Sebanyak 426.000 permintaan kredit rumah diajukan dari sekitar 582.000 eks-militer, yang sebagian besar terlibat dalam PD II.²⁸

Partisipasi keagamaan meningkat pada tahun 1950-an dengan peran gereja sebagai pusat aktivitas komunal. Peningkatan ini secara umum dapat dilihat di daerah-daerah pemukiman baru di pinggiran kota, dimana gereja menyediakan berbagai aktivitas komunal seperti sekolah minggu, organisasi kepemudaan, paduan suara, kelompok diskusi, dan berbagai olahraga seperti

tenis, sepakbola, dan *cricket*. Periode ini merupakan saat dimana semangat keagamaan tumbuh, yang diperkuat oleh berbagai macam gerakan misionaris dan kampanye-kampanye keagamaan yang berfungsi untuk menambah jumlah pengikut/jemaat.²⁹

Di bidang gaya hidup masyarakat Australia, peran mobil dan kendaraan lain menggantikan fungsi kendaraan umum. Akibatnya, transportasi publik lama-kelamaan menjadi berkurang. Jalur trem dibongkar demi kelancaraan bagi jalur kendaraan bermotor. Keberadaan mobil juga memberikan model baru bagi hiburan di waktu luang, seperti bioskop *drive-in*, paket liburan dengan karavan, penyewaan mobil untuk liburan di akhir pekan, dan sebagainya.³⁰

Pemerintahan Liberal Menzies (1949-1965) yang menggantikan Pemerintahan Buruh Chifley, memodifikasi dan memperluas program tunjangan yang sudah ada, juga memperkenalkan beberapa program yang baru. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbeda dari Pemerintah Chifley terhadap profesi medis, Pemerintah Menzies dapat memperkenalkan beberapa program baru dalam bidang kesehatan, termasuk skema baru "*life-saving drugs*" berupa pemberian obat-obatan pada tahun 1950, yang kemudian berkembang menjadi program tunjangan dalam sektor farmasi bagi masyarakat, program tunjangan kesehatan dan obat-obatan bagi para pensiunan pada tahun 1951,

dan membentuk *World Trade Organization* (WTO).

²⁷ Dare, Tim, *op.cit.*, hlm. 150.

²⁸ Long, Gavin, *loc.cit.*

²⁹ Macintyre, Stuart, *loc.cit.*

³⁰ *Ibid*,

dan program tunjangan kesehatan umum pada tahun 1953.³¹

KESIMPULAN

Welfare state didefinisikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara mengambil fungsi penting dalam perlindungan dan pengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Pemerintah Australia telah merancang konsep ini sejak Australia berdiri sebagai Federasi pada tahun 1901. Konsep ini kemudian terus digunakan dan dimatangkan hingga saat Australia masuk dalam periode Perang Dunia II. Setelah PD II selesai, Australia kemudian bersiap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang muncul pasca perang berakhir, sekaligus memantapkan konsep mengenai kesejahteraan masyarakat yang terus dikembangkan dari periode-periode sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan sosial yang diambil oleh pemerintah Australia pada periode setelah perang antara lain demobilisasi pasukan dan aset militer, peningkatan kesempatan kerja (*full employment*), program peningkatan jumlah penduduk sekaligus tenaga kerja (*populate or perish*), kebijakan dalam bidang ekonomi (Colombo Plan), serta pembentukan badan-badan terkait rencana rekonstruksi pasca perang (Departemen Rekonstruksi pasca Perang) dan pembentukan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan sipil (Departemen Layanan Sosial).

Kembalinya para veteran dari panggung perang menimbulkan polemik tersendiri ketika

banyak fenomena psikologis yang ditemukan pada orang-orang tersebut. Sindrom PTSD menjadi suatu masalah yang harus ditangani dengan cermat oleh pemerintah dan seluruh warga Australia yang terlibat. Peran pemerintah muncul dengan disahkannya Undang-Undang Rehabilitasi dan Ketenagakerjaan tahun 1945, yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi bagi para anggota militer, serta mengembalikan mereka ke kehidupan sipil. Masuknya para imigran sebagai hasil dari diberlakukannya kebijakan *populate or perish* menimbulkan perubahan pada demografi masyarakat Australia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Australia membuka pintu masuk bagi bermacam-macam imigran dari berbagai belahan dunia.

Masuknya para imigran ini memicu timbulnya multikulturalisme yang bahkan bisa dilihat hingga saat ini.

Di bidang ekonomi, Australia mengalami fenomena yang disebut dengan *post-war boom*, yaitu suatu keadaan dimana perekonomian Australia berkembang dengan pesat setelah PD II berakhir. Perkembangan ekonomi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain keberhasilan pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakan devaluasi ketika terjadi inflasi pada tahun-tahun pertama pasca perang berakhir, masuknya imigran dalam jumlah besar yang juga berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian dan ketenagakerjaan, serta keberhasilan perekonomian Australia di pasar dunia.

³¹ Kewley, T. H., "Social Security in Australia: Some Policy Issues." *Australian Journal of Social Issues*, Volume 3 No. 3, 1968, hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku**
- American Psychiatric Assosiation. 2013. *Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders* (Edisi kelima), (Washington: American Psychiatric Publishing.
- Curthoys, Ann & John Merritt. 1984. *Australia's First Cold War vol 1: Society, Communism and Culture*. Hong Kong: George Allen & Unwin.
- Dare, Tim, 1984. *Australia: A Nation Of Immigrants*. New South Wales: Child & Associates.
- Gotschalk, Louis. 1975. *Understanding History*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Kewley, T. H., 1968. "Social Security in Australia: Some Policy Issues." *Australian Journal of Social Issues*, Volume 3 No. 3.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Long, Gavin. 1973. *The Six Years War. A Concise History of Australia in the 1939-1945 War*. Canberra: Australian War Memorial.
- Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Jurnal**
- Gray, Mel, "The changing face of social welfare and social work in Australia," *ERIS web Journal*, 2011, New South Wales: University of Newcastle.
- Lindbeck, Assar, "The welfare state: background, achievements, problems," *IFN Working Paper No. 662, 2006*.
- Watts, Rob, "the origins of the Australian welfare state," *Historical Studies* volume 19 no.75, 1980.
- Arsip**
- Arsip Nasional Australia, "Migrant accomodations", www.naa.gov.au, diakses pada 9 Desember 2017.
- Internet**
- Henry, Ken, "Australia and the international financial architecture — 60 years on", *Economic Roundup Spring, 2003*, Treasury of Australian Government, <https://treasury.gov.au/publication/economic-roundup-spring-2003/australia-and-the-internation-financial-architecture-60-years-on/>. Diakses pada 19 Januari 2018.
- Stevens, Glenn, "Inflation and Disinflation in Australia: 1950-91," Reserve Bank of Australia, <http://www.rba.gov.au/publications/confs/1992/stevens.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2017.

Dosen Pembimbing



Saefur Rochmat, S.Pd., M.Ir., Ph.D.
NIP. 19681122 199403 1 001

Reviewer



Dr. Dyah Kumalasari, M. Pd.
NIP. 19770618 2003 12 2 001

